



<https://jurnal.iaindarussalam.ac.id/index.php/tarbiyah>

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM ERA OTONOMI DAERAH

Jihaduddin Akbar Auladi¹, Fatimah Tur Rizqi², Wasehudin³, Utang Ranuwijaya⁴
UIN SMH Banten

E-mail : jihaduddinakbarauladi92@gmail.com, sibintunkiki5@gamil.com,
wasehudin@uinbanten.ac.id, utang.ranuwijaya@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

This article explains the role of Islamic education in the implementation of educational autonomy that occurs in Indonesia both in Islamic educational institutions and in general educational institutions. The results of the study indicate that Islamic education plays a major role in the implementation of educational autonomy because Islamic education is a separate part that is able to implement its curriculum in Islamic educational institutions. This study is a literature study so that the data analyzed comes from various literature references using literature analysis in revealing the data. Thus, the implementation of educational autonomy in various educational institutions in Indonesia runs well in line with the educational and learning objectives to be achieved. In the context of Islamic education itself, the entire PAI curriculum is able to synergize with other subjects implemented in schools and madrasahs.

Keywords: *Islamic Education, Regional Autonomy.*

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang peran pendidikan Islam dalam pelaksanaan otonomi pendidikan yang terjadi di Indonesia baik di lembaga pendidikan Islam maupun di lembaga pendidikan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam berperan besar terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan karena pendidikan Islam bagian tersendiri yang mampu menerapkan kurikulumnya di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan sehingga data-data yang dianalisis bersumber dari berbagai referensi kepustakaan dengan menggunakan analisis literatur dalam mengungkap data tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi Pendidikan di berbagai lembaga pendidikan Indonesia berjalan dengan baik saling beriringan sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam konteks pendidikan Islam sendiri, seluruh kurikulum PAI mampu bersinergi dengan mata pelajaran lain yang diimplementasikan di sekolah dan madrasah.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Otonomi Daerah.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor yang masih sangat penting dalam menghadapi tantangan kehidupan global dan persaingan diabad modern. hal tersebut dikarenakan

pendidikan merupakan penentu mutu sumber daya manusia. Keunggulan suatu bangsa saat ini tidak lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, melainkan pada keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Secara teori ilmu pendidikan, bahwasanya pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu proses yang terus menerus, dari umur usia dini hingga dewasa di kehidupan manusia. Dalam sejarah pemikiran pendidikan Islam, banyak sekali tokoh pemikir dan ilmuwan pada era klasik yang telah memberikan kontribusi pemikiran terkait masalah-masalah pendidikan pada masanya. Hal tersebut tentunya harus diselaraskan dan dikembangkan agar sesuai dengan tuntunan dan tantangan zaman baik dari aspek manusia, waktu dan teknologi¹.

Pendidikan merupakan masalah penting yang tidak boleh diabaikan di negeri ini. Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pendidikan di Republik Indonesia tahun 2003 berdasarkan UU No. 20 tentang sistem pendidikan nasional, artinya seorang peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi spiritual atau daya religinya, yaitu upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar yang mendorong pembelajaran. Pengendalian dari individualitas dan kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi negara, bagi bangsa².

Proses pertumbuhan dan pengembangan hidup manusia merupakan salah satu faktor penting pada pendidikan. Terdapat bermacam cara untuk mewujudkan agar mimpi dan cita-cita pertumbuhan dan perkembangan bibit-bibit bangsa semakin lebih baik, sehingga menjadi menarik perhatian yang dominan untuk mengembangkannya. Tetapi, disisi lain dalam mengembangkan pendidikan itu ada beberapa titik rintangan dan tantangan yang dilaluinya, dan juga dilakukan bermacam cara dan usaha dalam melewati hambatan tersebut. Terlebih seperti saat ini yang tengah kita rasakan, di tengah beberapa polemik, ujian dan problematika yang terjadi pada negeri ini, sehingga semua aspek itu juga bertanggungjawab agar menjadi satu formulasi yang juga menjadi satu kekuatan

¹ Rusnadi Muhammad, M. Zainal Arif, and Rido Kurniato, 'Pemikiran Ibnu Sahnun Tentang Etika Profesi Guru Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Kode Etik Profesi Guru', *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2 (2020), pp. 286–308, doi:10.21274/taalum.2020.8.2.286-308.

² Lainah Lainah et al., "Kebijakan Otonomi Daerah (Regional Autonomy Policy) Dan Dampaknya Pada Pendidikan Madrasah," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 4 (2022): 6023–6031.

agar dapat melewati dari sekian polemik dan permasalahan yang terjadi pada masa pengembangan pendidikan³.

Pendidikan Islam sendiri seringkali dipandang secara tertutup. Dalam konteks otonomi pendidikan maka pendidikan Islam merupakan usaha melalui beberapa kegiatan pembelajaran supaya ajaran agama Islam bisa dijadikan pandangan bagi kehidupan masyarakat sebagai bekal dalam taat beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT. Pada sisi lain juga, pendidikan Islam diartikan secara terbuka, yaitu sebagai upaya dalam menumbuhkan dan mengembangkan pola pikir peserta didik dengan segala kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya. Tujuannya agar memenuhi amanat serta tanggung jawab dalam pengabdian kepada Allah SWT. Seluruh masyarakat muslim memiliki sebuah kewajiban untuk kembali kepada perencanaan pendidikan Islam sebab keberadaan pendidikan Islam di otonomi pendidikan didorong untuk menjadi aspek yang mampu membangun dan mengembangkan, bukan malah menjadi serangan balik terhadap pesatnya kemajuan era global⁴.

Otonomi merupakan pemberian urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional untuk membenahi sistem birokrasi pemerintahan. Tujuannya adalah menggapai efektivitas dan efisiensi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Dengan begitu, tujuan yang perlu dicapai dalam pemberian urusan tersebut antara lain mengembangkan daerah dalam berbagai bidang serta memberi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, memberikan kesempatan kepada daerah agar tumbuh mandiri dan meningkatkan daya saing daerah dalam menuju kemajuan yang lebih baik. lahirnya otonomi pendidikan di zaman modern ini akan terus menerus berkembang dan tidak akan memandang siapa yang akan menjadi pengikutnya, dan kemajuan pendidikan yang akan mampu menghancurkan segala yang menghambatnya⁵.

³ Durotun Nasihah, Anis Fauzi, and Abdul Muin, "Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan," *Qalam: Jurnal Ilmu Kependidikan* 12, no. 1 (2023): 19–27, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jq/article/view/2238>.

⁴ Noor Liyana Selvia, "Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Pada Era Reformasi: Di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren Dan Majelis Taklim," *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 2 (2024): 792.

⁵ Lainah Lainah et al., "Kebijakan Otonomi Daerah (Regional Autonomy Policy) Dan Dampaknya Pada Pendidikan Madrasah," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 4 (2022): 6023–6031.

Pemberlakuan otonomi daerah dalam bidang pendidikan memiliki aspek yang sangat luas dan meliputi berbagai faktor seperti pengelolaan anggaran, pemanfaatan sumber daya manusia, dan pengembangan potensi lokal lainnya. Kebijakan ini tidak dapat dipungkiri telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih terlibat dalam pengambilan berbagai kebijakan pendidikan. Diharapkan dengan dekatnya pengambil keputusan dengan institusi yang melaksanakan keputusan tersebut, maka kesenjangan antara harapan dan kenyataan menjadi kian sempit. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan tentang pendidikan diharapkan semakin memperhatikan kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan dan para peserta didik, serta semakin aplikatif untuk dilaksanakan⁶.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah dalam bidang Pendidikan masih ditemukan beberapa persoalan yang dihadapi seperti kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan, sumber daya manusia yang belum memadai, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia. Hal ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya dalam bidang Pendidikan. Karena itu pendidikan Islam menjadi kunci penting dan memberi bukti dari kemajuan suatu negara, maka dari itu semua masyarakat pembelajar harus membangunnya sebaik mungkin.

Dengan demikian, lahirnya tuntutan masyarakat Indonesia dalam hal demokratisasi pendidikan yang berharap lahirnya perubahan sektor lembaga pendidikan. Namun disisi lain perubahan tingkah laku peserta didik yang demokratis dituntut agar hubungan demokratis antara guru dengan peserta didik dapat memiliki perkembangan berpikir kreatif, pendidikan agama yang mengukir nilai-nilai moral dengan landasan iman dan takwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta mampu bersaing secara global. Ini semua pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang diajarkan pada lembaga pendidikan Islam sejak dahulu sampai hari ini. Otonomi pendidikan selain mendorong demi kemajuan lembaga pendidikan, tetapi juga mendorong SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

⁶ Junaidi Junaidi, "Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru," *Kuttab* 4, no. 1 (2020).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian pustaka untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan sekaligus memperoleh penjelasan secara rinci dari berbagai sumber dan pendapat yang relevan dengan keadaan yang diteliti⁷. Pada proses penelitiannya bersifat analisis deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, dan menganalisis. Adapun sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Setelah mengetahui sumber data, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, dokumen majalah, surat kabar, dan lain lain. Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan analisis data guna mendapatkan kesimpulan. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan analisis isi (*Content analysis*)⁸. Dengan penelitian ini, peneliti mencoba mengungkap lebih dalam. Materi yang dikumpulkan dalam karya ini bersifat deskriptif, yaitu penjelasan faktual tentang Sejarah Pendidikan Islam di era otonomi daerah. Materi yang dimasukkan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang diucapkan oleh informan sesuai dengan bidangnya, apa yang dipikirkan, dirasakan dan dialami oleh informan sebagai sumber informasi. Berdasarkan penelitian tersebut, berikut peneliti mencari informasi deskriptif tentang sejarah pendidikan Islam di era otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan Islam Era Otonomi Daerah

Permasalahan mendasar dalam kajian ini berlandaskan pada pengakuan negara terhadap madrasah dalam sistem pendidikan (terutama terkait dengan isi kurikulum), meskipun terdapat perbedaan fisik di dalam lembaga (terutama aspek manajemen). Hal ini mengindikasikan bahwa sentralisasi madrasah saat ini merupakan anomali dari semangat desentralisasi dan otonomi. Lebih jauh, konsep sentralisasi secara sadar/tidak

⁷ Waruwu M. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *J Pendidik Tambusai*. 2023;7(1):2896-2910.

⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *CV Alf*. Published online 2023:1-274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

sadar berdampak pada keberadaan madrasah di bawah kewenangan Kementerian Agama, yang selanjutnya berdampak pada kondisi dan perkembangan lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan perspektif tekstual dan kontekstual, UU otonomi daerah tidak/tidak langsung berdampak pada kondisi dan perkembangan madrasah di daerah. Dampak tersebut tampak jelas jika dibandingkan dengan sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diskriminasi ini sangat mencengangkan terkait kebijakan alokasi dana pemerintah dan subsidi per kapita, baik untuk siswa madrasah maupun sekolah negeri⁹.

Pendidikan Islam di era otonomi daerah memiliki makna yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Otonomi daerah yang berada di Indonesia sendiri diwujudkan dengan cara berbagi satu dengan yang lainnya, aspek kekuasaan yang pada akhirnya terfokuskan pada pemerintahan pusat dengan mengumpulkan sebagian dari hak dan tugas kepada pemerintah daerah. Seperti yang disebutkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sendiri, bahwasannya yang memiliki hak pemerintah pusat hanya bagian terkecil yang bersifat penting seperti beberapa hal yaitu urusan keamanan, moneter, keadilan, pertahanan, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan aspek-aspek kepentingan sendiri. Karena itu, Pengertian otonomi sendiri memiliki sifat yang multi dimensional, yang bermakna bahwasanya otonomi diberlakukan untuk seluruh aspek kehidupan dan segala kebutuhan anantara lain terdiri dari aspek individual ataupun keluarga untuk menentukan tempat berteduh, mencari pasangan, menentukan sandangnya dan antara lain yang paling penting ialah memilih dan menentukan bagaimana pendidikannya¹⁰. Oleh sebab itu, makna otonomi pendidikan ialah bagaimana cara setiap daerah-daerah di Indonesia dapat membina dan mengelola pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran, dan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan kewenangan yang maksimal dalam bidang pemerintahan. Selanjutnya diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saingnya melalui otonomi yang seluas-luasnya dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi,

⁹ Umi Kultsum, Muhammad Abrar Parinduri, and Abdul Karim, "Comparative Studies between Public and Private Islamic Schools in the Era of Globalization," *International Journal of Evaluation and Research in Education* 11, no. 1 (2022): 421–430.

¹⁰ Al Ulya, Jurnal Pendidikan, and Islam Volume, "Mfikri1,+4.+OTONOMI+DAERAH+DAN+PEMBIAYAAN+DAN+PENGARUHNYA+PADA+KINERJA+PENDIDIKAN+ISLAM" 6, no. 22 (2021): 43–55.

keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Negara Republik Indonesia¹¹.

Otonomi daerah juga selain berdampak pada Pendidikan umum juga berdampak terhadap Pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami masa yang panjang sepanjang perjalanan sejarah bangsa sebelum dan sesudah kemerdekaan hingga saat ini. Pendidikan Islam telah mengalami banyak proses, mengalami banyak rintangan, ujian dan beraneka kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Pada masa orde lama dan orde baru, nuansa pendidikan di Indonesia bersifat terpusat atau sentralisasi. Semua kebijakan, aturan dan cara pelaksanaan pendidikan harus seragam sebagaimana seragam anak sekolah yang dikenakannya. Memasuki era reformasi, kebijakan pendidikan mengalami perubahan seiring dengan perubahan paradigma pemerintahan yang lebih terbuka, bebas, partisipatif dan pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab¹².

Pelaksanaan otonomi pendidikan merupakan tantangan bagi lembaga pendidikan Islam sekaligus merupakan kekuatan. Dikatakan sebagai tantangan, karena selama era sentralisasi di masa sebelum reformasi, lembaga pendidikan Islam tergantung dengan pusat khususnya terkait kurikulum. Akibatnya kurikulum pendidikan Islam di daerah, minim inovasi sehingga pembelajaran agama hanya berkutat pada materi yang selalu sama dan kering dari makna kontekstualnya.¹⁷ Otonomi merupakan kekuatan bagi lembaga pendidikan Islam adalah dari segi ketahanan kelembagaannya. Pesantren dan madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam pada dasarnya merupakan lembaga yang sejak lahir sudah berjalan secara otonom.

Pendidikan Islam diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan yang lebih otonom dan profesional. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam harus memiliki strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

Penerapan Otonomi Daerah dalam Pembelajaran

¹¹ Firman Mansir, "Peran Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan Di Indonesia," *DAYAH: Journal of Islamic Education* 5, no. 2 (2022): 207.

¹² Noviyana Sari and Serly Fatma Yanti, "Sejarah Lokal Dan Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia," *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 4, no. 2 (2023): 114–132.

Secara paradigmatis, pendidikan Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang didasarkan pada visi, misi dan tujuan ajaran Islam. Secara umum, visi pendidikan Islam adalah sejalan dengan visi Islam sebagai rahmat bagi alam dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw. Visi itulah yang juga menjiwai aktivitas pendidikan Islam. Dalam al-Qur'an telah disebutkan:

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنزَلْنَاهُ وَمَا

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (TQS. al-Ambiya'/21: 107).

Rasulullah saw. diutus agar risalah yang dibawanya menjadi rahmat bagi alam, khususnya manusia. Rahmat bagi manusia bermakna bahwa risalah itu untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashâlih*) dan mencegah kemafsadatan (*dar'u al mafâsid*) dari manusia. Tujuan terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kemafsadatan merupakan hasil atau konsekuensi dari penerapan totalitas Islam¹³.

Visi *rahmatan lil'alam* dalam pendidikan adalah bahwa pendidikan mengemban visi kerahmatan yang Rasulullah Saw. diutus untuk itu. Dengan visi ini, pendidikan Islam berupaya mengangkat harkat dan martabat manusia, mengeluarkan manusia dari kesesatan, kebodohan dan keterbelakangan dengan memberikan pendidikan yang sesuai fitrah dan merata bagi semua manusia. Dalam Islam, pendidikan merupakan salah satu urusan rakyat yang menjadi tanggung jawab pemerintah (*al-ri'āyat al-syu'ūni al-ummah*). Karena itu, penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban negara terhadap rakyat. Negara dianggap lalai dari tanggung jawabnya jika tidak menyiapkan penyelenggaraan pendidikan yang memadai untuk rakyatnya, tentunya sesuai kemampuan negara¹⁴.

Prinsip ini mengandung makna bahwa pendidikan merupakan salah satu sistem dari sistem-sistem lainnya dalam negara yang dijalankan secara terpadu sebagai pelaksanaan syariat Islam oleh negara. Hal itu mengharuskan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, negara menjadikan politik dan ekonomi sebagai basis kekuatan operasionalnya. Dengan kekuatan politik, negara akan melahirkan kebijakan-

¹³ Abdul Rosyid and Nur Ali, "Latar Belakang Dan Visi Otonomi Pendidikan Di Indonesia," *Andragogi* 4, no. 3 (2022): 613–625.

¹⁴ Susi Lawati, "Metode Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 1, no. 1 (2021): 17–21.

kebijakan terkait regulasi, implementasi, kontrol dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dengan kekuatan ekonomi, negara akan mengalokasikan anggaran negara yang maksimal untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana urusan masyarakat lainnya.

Dalam paradigma holistik pendidikan Islam seperti ini tidak akan terdapat diskriminasi negara terhadap pendidikan, tidak dikenal istilah pendidikan unggulan karena semua pendidikan harus unggul sehingga tidak terdapat perbedaan perlakuan antara ibukota negara dengan di pelosok, kecuali jika terdapat aspek-aspek teknis yang diperlukan. Dengan demikian, negara tidak akan membebankan biaya penyelenggaraan pendidikan pada individu dan masyarakat sebagaimana negara tidak akan membebankan biaya kesehatan, biaya keamanan, dan biaya pembangunan infrastruktur kepada masyarakat. Keseluruhan beban biaya pelayanan masyarakat akan ditanggung oleh negara dengan optimalisasi pendapatan negara dari semua sektor anggaran pendapatan yang digariskan oleh syariat.

Dengan jaminan negara terhadap biaya pendidikan, lembaga pendidikan tidak perlu memikirkan bagaimana mendapatkan pemasukan dari peserta didik. Lembaga pendidikan akan mandiri dan bebas dari intervensi kepentingan komersial yang menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis para kapitalis. Kemandirian pendidikan seperti ini akan membuat manajemen pendidikan fokus pada aktivitas peningkatan mutu pendidikan untuk menggapai visi dan misi mendidik generasi Islam. Persoalan aspek-aspek dalam penyelenggaraan pendidikan, yang menyangkut asas, tujuan, dan kebijakan umum pendidikan tanggung jawab dan pelaksanaannya bersifat terpusat (sentralisasi). Aspek pelaksanaan manajemen secara teknis dan administratif, maka penyelenggaraannya bersifat mandiri (desentralisasi atau otonomi).

Penerapan otonomi pendidikan Islam di era otonomi daerah memerlukan pengelolaan pendidikan yang lebih modern dan profesional, seperti *Total Quality Education* (TQE). Selain itu Madrasah juga harus mampu meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan harapan masyarakat melalui pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat¹⁵.

¹⁵ Susi Lawati, "Metode Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 1, no. 1 (2021): 17–21.

KESIMPULAN

Otonomi diberikan kepada lembaga pendidikan dalam kewenangannya sebagai pengatur pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana dan pengelolaan keuangan dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dan stakeholder. Secara historis, otonomi pendidikan Islam di Indonesia sejak awal terlaksana. Masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi otonomi adalah lembaga pendidikan Islam negeri (madrasah) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yang secara kelembagaan menginduk kepada instansi vertikal, tetapi secara faktual berada dalam lingkup pemerintah daerah yang otonom. Secara paradigma pendidikan Islam yang holistik, otonomi pendidikan merupakan persoalan teknis yang tidak mesti diberlakukan secara merata untuk seluruh lembaga pendidikan, tetapi tergantung keadaan lembaga pendidikan di setiap daerah. Aspek yang diperlukan otonomi sekolah adalah penerimaan dan penempatan siswa baru, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, pelajaran muatan lokal diserahkan kepada daerah, pelaksanaan evaluasi hasil belajar diserahkan kepada sekolah, keterlibatan masyarakat diboletkan, pemerintah menyediakan dana pendidikan untuk seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Junaidi, Junaidi. "Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru." *Kuttab* 4, no. 1 (2020).
- Kultsum, Umi, Muhammad Abrar Parinduri, and Abdul Karim. "Comparative Studies between Public and Private Islamic Schools in the Era of Globalization." *International Journal of Evaluation and Research in Education* 11, no. 1 (2022): 421–430.
- Lainah, Lainah, Zulmuqim Zulmuqim, Iswantir Iswantir, and Bambang Trisno. "Kebijakan Otonomi Daerah (Regional Autonomy Policy) Dan Dampaknya Pada Pendidikan Madrasah." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 4 (2022): 6023–6031.
- Lawati, Susi. "Metode Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 1, no. 1 (2021): 17–21.
- Mansir, Firman. "Peran Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Otonomi Pendidikan Di Indonesia." *DAYAH: Journal of Islamic Education* 5, no. 2 (2022): 207.
- Nasihah, Durotun, Anis Fauzi, and Abdul Muin. "Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan." *Qalam : Jurnal Ilmu Kependidikan* 12, no. 1 (2023): 19–27. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jq/article/view/2238>.
- Rosyid, Abdul, and Nur Ali. "Latar Belakang Dan Visi Otonomi Pendidikan Di Indonesia." *Andragogi* 4, no. 3 (2022): 613–625.
- Sari, Noviyana, and Serly Fatma Yanti. "Sejarah Lokal Dan Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia." *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 4, no. 2 (2023): 114–132.
- Selvia, Noor Liyana. "Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Pada Era Reformasi: Di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren Dan Majelis Taklim." *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 2 (2024): 792.
- Tarbiyatuna, Jurnal, Kajian Pendidikan, Islam Volume, Print Issn, and Online Issn. "1 , 2 , 3" 8 (2024).
- Ulya, Al, Jurnal Pendidikan, and Islam Volume. "Mfikri1,+4.+OTONOMI+DAERAH+DAN+PEMBIAYAAN+DAN+PENGARUHNYA+PA DA+KINERJA+PENDIDIKAN+ISLAM" 6, no. 22 (2021): 43–55.